

EKSISTENSI MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI ERA GLOBALISASI

Andryady, M. Umar Setiawan

E-mail: umarsetiawan12@gmail.com

Abstrak: Pendidikan Inklusif merupakan upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana pendidikan inklusif memiliki prinsip setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda khususnya anak berkebutuhan khusus (ABK). Oleh karena itu pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak, untuk menciptakan dan menjaga komunitas yang ramah dan mampu menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait sehingga pendidikan inklusif dapat diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan. Pengelolaan Pendidikan Inklusif tidak lepas dari Manajemen, dimana Manajemen Pendidikan menjadi kunci keberhasilan program Pendidikan Inklusif meliputi proses Asesmen, Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dengan meningkatkan pengelolaan yang terencana dengan baik. Kedepannya diharapkan dapat menghasilkan output anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mampu bersaing dengan anak normal di era globalisasi dengan perkembangan keilmuan, iptek dan perkembangan kemajuan jaman serta kebutuhan taraf hidup yang terus meningkat.

Kata kunci: manajemen pendidikan, pendidikan inklusif, globalisasi

Abstract: Inclusive education is the government's efforts in Indonesia educational equity for all people of Indonesia, which has the principle of inclusive education that every child has the capabilities and needs of the different particular needs children khusus (ABK). Therefore education should be made to adjust to the child's condition, to create and maintain a friendly community and able to accept diversity and respect differences involving all components of education related to inclusive education can be held on an ongoing basis at all levels of education. Management Inclusive Education can not be separated from management, which is key to success of Management Education Inclusive Education program covers the process of assessment, planning, management, supervision by improving the management of well-planned. The future is expected to generate output children with special needs (ABK) that can compete with normal children in the age of globalization with the development of science, science and technology and the progress of the era as well as the needs of an ever-increasing standard of living.

Keywords: education management, inclusive education, globalization

Menghadapai globalisasi, Perkembangan jaman yang semakin maju baik di dunia kerja maupun pendidikan serta jumlah penduduk yang terus meningkat. Memberikan dampak terhadap kebutuhan hidup, meningkatnya persaingan antar pencari kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri tidak akan dapat dibendung. Salah satu solusi dalam mengatasinya problema tersebut adalah dengan terus meningkatkan taraf pendidikan, dimana pendidikan

menjadi salah satu faktor penilaian terhadap profesionalitas, kredibilitas untuk seorang dapat bersaing mendapatkan peluang kerja atau menciptakan dunia kerja baru, dari pengalaman maupun pendidikan yang di dapat. Sehingga dalam persaingan kedepan indonesia akan terus dapat eksis memberikan cendikiawan dan pekerja profesional ke dunia.

Meningkatnya jumlah penduduk di indonesia memberikan banyak temuan baru dan bermacam problema, seperti meningkatnya keinginan untuk mendapatkan pendidikan serta temuan bahwa terdapat anak yang memiliki kebutuhan khusus atau disebut (ABK). pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) kinipun telah di tangani dengan baik melalui pendidikan pada Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun pada kenyataannya, jumlah penduduk yang signifikan serta perkembangan jaman yang tidak terbendung mengakibatkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bukan berkurang tetapi meningkat signifikan, hal ini menyebabkan sekolah-sekolah luar biasa yang ada, tidak mampu menampung jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Perkembangan pendidikan di Indonesia yang terus berkembang memberikan banyak inovasi baru pada dunia pendidikan dalam menjawab keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, salah satu inovasi baru dalam mengatasi kebutuhan pendidikan dalam hal mengatasi ketidakmampuan Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam menampung jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Dijawab dengan menjalankan sekolah inklusi di mana sekolah-sekolah umum (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MAN, SMK/MAK) dapat menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk menjalankan pendidikan disekolah bersama dengan anak normal (non-ABK).

Sekolah Inklusi merupakan produk inovasi dalam menjawab pemerataan pendidikan bagi seluruh warga indonesia baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus (ABK), dengan memberdayakan sekolah-sekolah yang tentunya diberikan panduan, bantuan, dan pemahaman terhadap pendidikan inklusi. Dalam meningkatkan Program Sekolah Inklusif tentunya tidak terlepas dari Manajemen Inklusif di dalamnya dikarenakan perlunya perhatian khusus bagi peserta didik sehingga Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat mendapatkan pendidikan setara dengan anak normal biasanya. Sayangnya program inklusi di Indonesia saat ini masih berjalan kurang maksimal dikarenakan manajemen pengelolaan yang tidak terkoordinasi, di dalam perjalanan perkembangan pendidikan inklusi saat ini masih terdapat sekolah-sekolah yang menjalankan program pendidikan

inklusif dengan pengelolaan yang tidak jelas dari sistem assesmen, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan program ini di beberapa sekolah inklusif.

Permasalahan Pendidikan Inklusif tentunya tidak hanya menjadi tugas dari orang-orang yang berkecimpung dalam Pendidikan Luar Biasa atau praktisi inklusif saja namun tentunya Manajemen Pendidikan memiliki peranserta sebagai penghasil sumber daya manusia (SDM) yang handal dan profesional yang membangun dan mengembangkan lembaga pendidikan melalui manajemen pendidikan modern yang memiliki landasan teori dan praktik serta landasan saintifik. Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan manajemen pendidikan inklusif sangat dibutuhkannya eksistensi Manajemen Pendidikan dalam meningkatkan Pendidikan Inklusif sehingga dengan manajemen yang tertata dengan baik meliputi pengelolaan peserta didik, pengelolaan tenaga pendidik, maupun sarana sampai kepada kurikulum pendidikan inklusif diharapkan kedepan output dari lembaga pendidikan bukan sekedar memiliki ijazah untuk melanjutkan pendidikan saja, namun dapat terus bersaing untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan kesempatan pendidikan serta kedudukan yang setara dengan orang normal (non-ABK) serta pendidikan inklusif pada sekolah inklusi dapat memberikan bekal pengalaman kerja/keterampilan bagi peserta didik (ABK) dengan pendekatan berdasarkan minat bakat peserta didik.

PEMBAHASAN

Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Direktorat Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional (2007) menyebutkan, kebijakan dan praktek pendidikan inklusif mengaplikasikan gerakan yang sejalan dengan dengan prinsip pendidikan untuk semua atau *education for all*.

Peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa lebih lanjut disebut sebagai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Purwanto (2008:1) mengatakan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristik, yang membedakan mereka dari anak-anak normal, Lebih lanjut Wardani (2008:1-5) Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda. ABK dikategorikan menjadi lima

kelompok, yaitu : (1) Kelompok yang mengalami penyimpangan dalam bidang intelektual, terdiri dari anak yang luar biasa cerdas (*intellectually superior*) dan anak yang tingkat kecerdasannya rendah atau disebut tunagrahita; (2) Kelompok yang mengalami penyimpangan atau keluarbiasaan yang terjadi karena hambatan sensori atau indra, terdiri dari anak tunanetra dan tunarungu; (3) Kelompok anak yang mendapat kesulitan belajar dan komunikasi. (4) Kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku, yang terdiri dari anak tunalaras dan penyandang gangguan emosi." (5) Kelompok anak yang mempunyai keluarbiasaan/ penyimpangan ganda atau berat dan sering disebut tuna ganda.

Kebutuhan akan kreativitas dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan kebutuhan peserta didik, dalam masa pembangunan dan era yang semakin mengglobal dan penuh persaingan ini setiap individu dituntut untuk mempersiapkan mentalnya agar mampu menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Oleh karena itu, pendidikan bagi anak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak boleh diabaikan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, dalam lampiran Bab 1 menjelaskan bahwa; (1) Pendidikan inklusif adalah pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah reguler dalam satu kesatuan yang sistemik; serta sesuai yang di amanatkan dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas; agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Eksistensi Manajemen Pendidikan dalam Pendidikan Inklusif

Berdasarkan survei penulis pada sekolah-sekolah inklusif di kota Malang, Jawa Timur. Masih banyak temuan di lapangan, di mana sekolah yang melayani pendidikan inklusif ternyata tidak memiliki sistem manajemen yang baik membuat pendidikan inklusif berjalan apa adanya hanya sekedar menerima dan menyekolahkan anak ABK saja. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Untuk mencapai sebuah pendidikan yang berkualitas tentunya diperlukan manajemen yang mampu memobilisasi sumber daya pendidikan dengan maksimal oleh karna itu sangat penting bagi sekolah melakukan penataan menajemennya

menurut substansi manajemen pendidikan, serta perlunya memahami apa arti dari manajemen pendidikan itu sendiri.

Usman (2008:9) menyebutkan manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, Lebih lanjut.

Engkoswara (2001:2) menyebutkan manajemen ialah suatu ilmu yang mempelajari sebagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara produktif dan sebagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta didalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Sehingga manajemen pendidikan itu sendiri merupakan seni dan ilmu untuk mengelola sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien mandiri dan akuntabel.

Dengan pengelolaan yang baik pada sekolah inklusif dengan memperhatikan manajemen pendidikan akan lebih mudah ke depan mengembangkan sekolah, sehingga sekolah tidak hanya sekedar menerima siswa berkebutuhan khusus saja untuk disekolahkan. Namun dapat dimaksimalkan potensi dan kecerdasannya sesuai minat dan bakat peserta didik. Adapun bidang garapan substansi manajemen pendidikan, Rohiat (2008:21) menyebutkan dalam melaksanakan kegiatannya, sekolah memiliki bidang garapan. Oleh karena itu, diperlukan keteraturan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan bidang garapannya. Adapun garapan dalam manajemen sekolah yaitu:

Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar.

Kurikulum pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian karena ragam hambatan yang dialami

peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya, kurikulum reguler dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modifikasi (penyelarasan) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari: kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan memodifikasi pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan siswa (anak berkebutuhan khusus). Hasil pengembangan kurikulum ini biasa disebut dengan Program Pendidikan Individual (PPI) diperuntukan pada siswa yang mempunyai hambatan belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar berdasarkan kurikulum reguler. Penerapan kurikulum PPI dapat dilakukan sebagai contoh seorang siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti 3 mata pelajaran berdasarkan kurikulum reguler sedangkan mata pelajaran lainnya berdasarkan PPI.

Tujuan Pengembangan Kurikulum adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami siswa semaksimal mungkin dalam setting inklusi, dan mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik yang diselenggarakan di sekolah, di luar sekolah maupun di rumah.

Manajemen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan mempunyai peran yang signifikan dan sangat mendasar mulai dari penerimaan siswa baru, pembinaan siswa, atau pengembangan diri sampai dengan proses kelulusan siswa. Manajemen kesiswaan menduduki posisi strategis dan sentral dalam layanan pendidikan, baik dalam latar institusi persekolahan maupun yang berada di luar latar institusi persekolahan, tertuju kepada siswa. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, Bab II, pasal 3, yang berbunyi: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peningkatan kualitas pendidikan inklusif di sekolah tidak hanya terpaku pada pencapaian aspek akademik, melainkan aspek non akademik baik penyelenggaraannya dalam bentuk kegiatan kurikuler ataupun ekstrakurikuler, melalui berbagai program kegiatan yang sistematis dan sistematis dimana siswa non-ABK dan siswa ABK dapat berbaur mengikuti kegiatan pendidikan dan non pendidikan didalam sekolah.

Sasaran pendidikan inklusif secara umum adalah semua peserta didik yang ada di sekolah reguler. Tidak hanya mereka yang sering disebut sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi juga mereka yang termasuk anak 'normal'. Mereka secara keseluruhan harus memahami dan menerima keanekaragaman dan perbedaan individual. Secara khusus, sasaran pendidikan inklusif adalah anak berkebutuhan khusus, baik yang sudah terdaftar di sekolah reguler, maupun yang belum dan berada di lingkungan sekolah reguler.

Identifikasi dimaknai sebagai proses penjarangan, sedangkan assesment dimaknai sebagai penyaringan. Identifikasi anak dimaksudkan sebagai suatu upaya seseorang (orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya) untuk melakukan proses penjarangan terhadap anak yang mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, intelektual, sosial, emosional/tingkah laku) dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Hasil dari identifikasi adalah ditemukannya anak-anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan layanan pendidikan khusus melalui program inklusi. Identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan untuk lima keperluan, yaitu: penjarangan (*screening*), pengalihan (*referral*), klasifikasi, perencanaan pembelajaran, pemantauan kemajuan belajar, dan evaluasi program.

Manajemen Personil

Manajemen Personil/kepegawaian di dalam suatu sekolah meliputi semua proses atau cara memperoleh pegawai. Penempatan dan penugasan. Pemeliharaannya. Pembinaan. Evaluasi. Serta pemutusan hubungan kerja. Dalam pengelolaan pendidikan inklusif jumlah guru reguler di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tidak perlu ditambah tetapi disediakan guru pendidikan khusus (GPK) dari SLB yang dijadikan center (bisa SLB Pembina atau SLB terdekat) atau guru sekolah reguler yang dididik dan dilatih untuk menjadi seorang guru yang memahami ilmu Pendidikan Luar Biasa.

Tenaga pendidik Inklusif mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Tenaga pendidik

meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan guru pendidikan khusus (GPK).

Guru berkedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan pada usia dini pada jalur pendidikan formal yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan untuk masing-masing guru secara rinci meliputi: (1) Guru Kelas berkedudukan di sekolah dasar yang ditetapkan berdasarkan kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah; (2) Guru mata pelajaran/bidang studi adalah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan di sekolah; dan (3) Guru Pendidikan Khusus berkedudukan sebagai guru pendamping khusus. Secara administrasi status kepegawaian, tugas dari GPK adalah: (a) Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik; (b) Melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi; (c) Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedi ataupun pengayaan; (d) Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran; dan (e) Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus

Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar.

Komponen sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan inklusi, menjadi salah satu komponen penting, melihat karakteristik anak berkebutuhan khusus, maka sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain komponen tanah, gedung, kantor lab, monumen, tempat tinggal diperlukan alat-alat spesifik seperti ruang khusus bagi anak low vision, ruang kedap suara bagi tunarungu, dan berbagai alat peraga untuk anak autis.

Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi asesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Manajemen Keuangan

Pendanaan pendidikan inklusif memerlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang baik walaupun penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan pada sekolah reguler dengan penyesuaian, namun tidak serta merta pendanaan penyelenggaranya dapat diikutkan begitu saja dengan pendanaan sekolah reguler. Maka diperlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif, hal yang perlu diperhatikan untuk dialokasikan dana khusus, terlebih bagi sekolah-sekolah yang baru dalam menerapkan pendidikan inklusif adalah; (1) Kegiatan identifikasi input siswa, seperti mempersiapkan data siswa dan melakukan asesmen pada saat penerimaan siswa; (2) Memodifikasi kurikulum, dalam mengembangkan kurikulum PPI; (3) Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, seperti pengadaan guru GBK atau mendatangkan guru bantu dari SLB tentunya akan memerlukan pendanaan khusus; (4) Pengadaan sarana dan prasarana, dalam rangka meningkatkan performa dari kualitas pembelajaran dan memudahkan bagi guru-guru mengatasi Peserta Didik ABK; (5) Pemberdayaan peran serta masyarakat, dalam rangka memberdayakan peran serta masyarakat tentunya awal sekolah harus mampu mempromosikan sekolahnya dimana dalam proses promosi ini pastinya tidak luput dari pendanaan disekolah; dan (6) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan bantuan alat dan media belajar yang baik akan memaksimalkan pembelajaran, karna siswa ABK memiliki keunikan sendiri dalam menangkap pembelajar di dalam kelas sehingga guru harus mampu mengoptimalkan alat atau media yang ada dan dalam proses ini guru mengkoordinir kebutuhan pembelajaran bagi tiap murid.

Penting bagi sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Inklusif (RAPBSI) dalam satu tahun pelajaran yaitu dengan menghimpun kegetori pembiayaan sebagai berikut; (1)

Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan sarana/prasarana pendidikan inklusif; (2) Peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar inklusif; (3) Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan ABK dan Non-ABK; (4) Dukungan kegiatan sekolah dan peningkatan personil guru Inklusi atau GBK; dan (5) Kegiatan rumah tangga sekolah

Dengan demikian penanganan pendanaan sekolah dapat terkontrol karena diketahui peserta didik ABK memiliki keunikan masing-masing sehingga dengan perencanaan yang baik dapat memaksimalkan sarana/prasarana pendidikan inklusif.

Manajemen Kemitraan/ Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Pada hakikatnya pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu para pembina dan pelaksana pendidikan di lapangan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif secara optimal.

Partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain dalam: (1) perencanaan; (2) penyediaan tenaga ahli/profesional terkait; (3) pengambilan keputusan; (4) pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi; (5) pendanaan; (6) pengawasan; dan (7) penyaluran lulusan.

Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan inklusi dapat diakomodasikan melalui wadah: (1) komite sekolah, (2) dewan pendidikan; (3) forum-forum pemerhati pendidikan inklusif.

Manajemen Layanan Khusus

Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan di organisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Diantaranya meliputi; manajemen layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan asrama, manajemen kafetaria/kantin sekolah, parkir, antar jemput dll. Layanan-layanan tersebut dikelola secara baik dan benar sehingga dapat membantu memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kusmintardjo (1992:4), pelayanan khusus atau pelayanan bantuan diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah.

Layanan khusus dalam sekolah inklusi tentunya akan lebih kompleks daripada layanan khusus di dalam sekolah reguler biasanya hal ini membuat kepala sekolah harus

perlu mempertimbangkan secara matang apabila akan menyelenggarakan layanan khusus, kepala sekolah harus selalu melihat hubungan antara layanan khusus dengan program pendidikan secara menyeluruh. Terkait kedalam pendidikan inklusi program pendidikan inklusi sangat membutuhkan layanan maksimal dalam membantu dalam proses pendidikan siswa ABK di sebuah sekolah dari berbagai hal seperti ketersediaan ruang isolasi terapi, ruang bimbingan, ruang belajar khusus bagi tunarungu, alat bantu visual, alat bantu auditif, alat orthotic, prothetic dan alat latihan fisik lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Manajemen kurikulum dalam sekolah inklusi perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa dari kurikulum reguler sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan memodifikasi pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan siswa (anak berkebutuhan khusus).

Peningkatan kualitas pendidikan inklusif di sekolah tidak hanya terpaku pada pencapaian aspek akademik, melainkan aspek non akademik baik penyelenggaraannya dalam bentuk kegiatan kurikuler ataupun ekstrakurikuler. Oleh karenanya sekolah inklusi memanager siswa agar dapat mengikuti berbagai program kegiatan yang sistematis dan sistematis dimana siswa non-ABK dan siswa ABK dapat berbaur mengikuti kegiatan pendidikan dan non pendidikan didalam sekolah. Dengan demikian perlu adanya penentuan sasaran siswa, dan identifikasi dan assesmen melalui kegiatan *screening* Penjaringan (*screening*), Pengalihanganan (*referral*), Klasifikasi, Perencanaan pembelajaran, Pemantauan kemajuan belajar, dan Evaluasi program.

Dalam pengelolaan pendidikan inklusif jumlah guru reguler di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tidak perlu ditambah tetapi disediakan guru pendidikan khusus (GPK) dari SLB yang dijadikan center (bisa SLB Pembina atau SLB terdekat) atau guru sekolah reguler yang dididik dan dilatih untuk menjadi seorang guru yang memahami ilmu Pendidikan Luar Biasa.

Sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu.

Penyelenggaraan sekolah inklusif meskipun mayoritas manajemen menyesuaikan dengan dengan sekolah reguler, dengan menambahkan beberapa hal untuk memenuhi kebutuhan untuk sekolah inklusif itu sendiri. Maka diperlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan inklusi dapat diakomodasikan melalui wadah: (1) komite sekolah, (2) dewan pendidikan; (3) forum-forum pemerhati pendidikan inklusif.

Terkait kedalam pendidikan inklusi program pendidikan inklusi sangat membutuhkan layanan maksimal dalam membantu dalam proses pendidikan siswa ABK di sebuah sekolah dari berbagai hal seperti ketersediaan ruang isolasi terapi, ruang bimbingan, ruang belajar khusus bagi tunarungu, alat bantu visual, alat bantu auditif, alat *orthotic*, *prothetic* dan alat latihan fisik lainnya.

Saran

Pendidikan inklusif perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah, sehingga siswa ABK dapat mendapat pendidikan yang setara dengan siswa non ABK serta tidak diskriminatif. Bagi peneliti dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan terfokus terhadap pendidikan inklusif untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif itu sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Dapa, Aldjon. Dkk. 2007. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2007. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa.
- Engkoswara. 2001. *Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah*. Bandung: Yayasan Amal Keluarga.

- Husaini, Usman. 2008. *Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusmintardjo. 1993. *Pengelolaan Layanan Khusus di Sekolah. (jilid 2)*. Malang: OPF IKIP Malang.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang *Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus*.
- Rohiat 2008. *Manajemen Sekolah (Teori dasar dan praktik dilengkapi dengan contoh rencana strategis dan operasional)*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wardani, I.G.A.K., Astati, Hernawati, T., & Somad, P. 2009. *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Universitas Terbuka